

PEMAHAMAN NILAI-NILAI AJARAN AGAMA (ANALISIS PENDEKATAN TEORI KONFLIK DAN TEORI FUNGSIONAL)

Nurliana Damanik
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
nurlianadamanik@uinsu.ac.id

Abstrak

Agama memiliki dua kekuatan utama, yaitu sebagai faktor kekuatan daya penyatu (centripetal) dan faktor kekuatan daya pemecah belah (centrifugal). Dalam sebuah masyarakat yang pluralis, yang dipadati multietnik, bahasa dan agama ditampilkan sebagai faktor sentripetal dan juga berfungsi sebagai sosial kontrol dan motivator pembangunan berdimensi kemanusiaan. Bahkan agama juga berperan sebagai instrumen perekat keutuhan bangsa. Fungsi kritis agama diperlukan bukan hanya untuk menyadarkan pola pikir dan perilaku individu di dalam masyarakat, tetapi juga untuk memberikan arah terhadap konsep dan perencanaan pembangunan. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Teori fungsional dalam ilmu sosiologi adalah salah satu perspektif di dalam ilmu sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Teori ini memandang bahwa masyarakat bersifat statis atau berada dalam perubahan secara berimbang, di mana setiap elemen masyarakatnya memiliki peran menjaga stabilitas tersebut. Sedangkan teori konflik adalah keadaan yang tidak diinginkan setiap orang lantaran merugikan material dan nonmaterial. Marx dan Weber secara tegas menolak gagasan yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung mengarah pada konsensus dasar atau harmoni, di mana struktur masyarakat yang berlangsung bekerja untuk kebaikan setiap orang. Dari kedua hal ini, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan fenomena sosial yang hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan selalu ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial, dan fungsi dan peran agama perlu dipertahankan kelangsungannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai kekuatan utama.

Kata Kunci: *Teori Fungsional, Teori Konflik, Masyarakat, Agama*

Abstract

Religion has two main forces, namely as a factor of the power of unifying power (centripetal) and a factor of strength of divisive power (centrifugal). In a pluralist, multiethnic society, language and religion are presented as centripetal factors and also function as social control and motivators of development with a human dimension. Even religion also acts as an instrument of glue for the integrity of the nation. The critical function of religion is necessary not only to sensitize the mindset and behavior of individuals in society, but also to provide direction to development concepts and planning. Conflict theory arose as a reaction to the emergence of functional structural theory. Functional theory in sociology is one of the perspectives in sociology that views society as a system consisting of parts that are interrelated with one another. This theory views that society is static or in a balanced change, where each element of society has a role in maintaining stability. While conflict theory is a situation that everyone does not want because it harms material and nonmaterial. Marx and Weber categorically rejected the idea that society tends to lead to basic consensus or harmony, in which the ongoing structure of society works for the good of everyone. From these two things, it can be concluded that conflict is a social phenomenon that is present in social life, so conflict is inherent, meaning that conflict will always exist in every time and space, anywhere and anytime. In this view, society is an arena of conflict or an

arena of conflict and integration that always takes place. Therefore, conflict and social integration are symptoms that always fill every social life, and the function and role of religion needs to be maintained in social and state life as the main force.

Keywords: Functional Theory, Conflict Theory, Society, Religion

Pendahuluan

Agama memiliki dua kekuatan utama, yaitu sebagai faktor kekuatan daya penyatu (centripetal) dan faktor kekuatan daya pemecah belah (centrifugal). Ada benarnya ungkapan kalangan ahli fenomenologi agama bahwa agama itu identik dengan nuklir yg memiliki gerakan yang sangat cepat, tetapi di sisi lain bisa juga menjadi bumerang bagi manusia dalam mempertahankan konsep teologisnya kepada agama lain. Dalam sebuah masyarakat yang pluralis, yang dipadati multietnik, bahasa, dan agama, apalagi terpisah-pisah oleh kepulauan seperti Indonesia, maka disadari betul betapa pentingnya menampilkan agama sebagai faktor sentripetal. Selain sebagai keyakinan yang dianut secara paripurna, agama juga berfungsi sebagai sosial kontrol dan motivator pembangunan berdimensi kemanusiaan. Bahkan agama juga berperan sebagai instrumen perekat keutuhan bangsa. Dengan menyadari arti penting agama tadi, maka fungsi dan peran agama perlu dipertahankan kelangsungannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kekuatan agama sebagai faktor sentripetal telah berjasa besar di dalamnya. Pemimpin dan para elite penguasanya boleh gonta-ganti tetapi kekuatan nilai-nilai dan norma-norma agama sebagai living law didalam masyarakat tetap bekerja. Masing-masing umat beragama di Indonesia menjalankan ajaran-ajaran dan hukum agamanya dengan taat tanpa peduli siapa pun penguasanya. Masalah agama adalah salah satu faktor yang sangat sensitive baik di Indonesia maupun mendunia. Selain itu, fungsi kritis agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentu sangat diperlukan, terlebih lagi dalam konteks masyarakat bangsa kita yang sedang menjalani masa transisi dari sebuah reformasi. Fungsi kritis agama diperlukan bukan hanya untuk menyadarkan pola pikir dan perilaku individu di dalam masyarakat, tetapi juga untuk memberikan arah terhadap konsep dan perencanaan pembangunan.

Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Yang diisyirkannya dengan kelas bawah (proletar) dan kelas atas (borjuis). Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional.

Pada saat itu Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke-19 di Eropa di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkis, kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis (false consciousness) dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan antara kaum proletar dan kaum borjuis mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi. Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum borjuis terhadap mereka.

Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan, hal ini diribuktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, korelasi dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda akan menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan.

Teori konflik juga menyatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power. Terdapat dua tokoh sosiologi modern yang berorientasi serta menjadi dasar pemikiran pada teori konflik, yaitu Lewis A. Coser dan Ralfd.

Pendekatan Teori Fungsional Terhadap Agama

1. Teori Fungsional

Fungsional adalah sesuatu hal yang dirancang untuk mampu melakukan satu atau lebih dari kegiatan yang practical, lebih mengutamakan fungsi dan kebergunaan ketimbang hal-hal yang berbau dekorasi atraktif. (tidak ada fitur yang tidak perlu).

Teori fungsional dalam ilmu sosiologi adalah salah satu perspektif di dalam ilmu sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, atau bagian yang satu tidak akan bisa berfungsi tanpa ada hubungan dan keterikatan dengan bagian lainnya, dengan kata, masyarakat luas hanya akan bisa berjalan dengan normal jika masing-masing elemen menjalankan fungsinya dengan baik (Bernard Raho, 2007).

Fungsional berasal dari kata fungsi yang secara umum berarti kegunaan akan sesuatu. Secara bahasa fungsional dapat diartikan sebagai suatu aspek yang ditinjau berdasarkan fungsinya. Maka dari itu peninjauan terhadap suatu aspek secara fungsional sama saja artinya dengan meninjau aspek tersebut berdasarkan fungsinya. Contoh pembahasannya dapat berupa fungsi umum, fungsi khusus, hal yang terjadi apabila fungsi tersebut terganggu, atau bahkan bagaimana fungsi itu bisa terjadi (Meredith B McGuire, 1997).

Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian, dalam perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan (Meredith B McGuire, 1997).

Istilah fungsional dapat kita jumpai dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam ilmu ketatanegaraan misalnya dikenal istilah jabatan fungsional yang mengacu pada jabatan dengan fungsi tertentu yang spesifik. Masing-masing jabatan ini menjalankan fungsinya masing-masing secara spesifik fungsional.

Istilah fungsional juga banyak dipakai dalam ilmu biologi. Suatu makhluk hidup biasanya dianalisis melalui 2 aspek, yakni aspek struktural dan aspek fungsional. Pengamatan ginjal manusia misalnya. Apabila dilakukan secara struktural maka pengamatan tersebut berfokus pada bagian-bagian ginjal, kandungan unsur dalam ginjal, bentuk ginjal, dll. Sementara itu pada pengamatan secara fungsional yang akan dibahas ialah bagaimana fungsi ginjal, adakah perbedaan ginjal yang kanan dengan ginjal yang kiri, apa yang terjadi jika fungsi ginjal terganggu, dll. Pembahasan lebih mendalam seputar aspek fungsional dalam biologi bahkan dilakukan dalam cabang ilmu tersendiri yang disebut fisiologi (Emile Durkheim, 1947).

Fungsionalisme adalah teori filsafat yang menganggap fenomena mental dalam kesatuan dinamis sebagai suatu sistem dari fungsi untuk pemuasan kebutuhan yang sifatnya biologis. Fungsionalisme adalah sebuah pemikiran yang tidak menolak substansi imaterial, tetapi menyatakan bahwa pada akhirnya semua substansi bersifat material. Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian, dalam

perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan (Lorens Bagus, 2002).

2. Pendekatan Para Ahli

Asumsi dasar dari teori struktural fungsional terletak pada konsep keteraturan masyarakat. Teori ini memandang bahwa masyarakat bersifat statis atau berada dalam perubahan secara berimbang, di mana setiap elemen masyarakatnya memiliki peran menjaga stabilitas tersebut. Sebagaimana perspektif makro, teori ini mengulas perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut berpengaruh terhadap kondisi keseimbangan organisasi atau masyarakatnya. Teori struktural fungsional banyak mempengaruhi perkembangan teori sosiologi hingga sekarang.

Pusat pertumbuhan teori sosial sendiri adalah di Amerika Serikat. Negara ini sekaligus menjadi tempat runtuhnya teori struktural fungsional itu sendiri, yang populer pada dekade 1930 an hingga 1960 an. Asumsi utama dari teori ini adalah anggapan bahwa masyarakat merupakan organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling mengalami ketergantungan sebagai konsekuensi agar organisme tersebut dapat tetap bertahan hidup. Melalui pendekatan struktural fungsional ini, para sosiolog berharap dapat mencapai keteraturan sosial dalam masyarakat (Emile Durkheim, 1947).

Adapun, teori sosiologi dan tokohnya yang memberikan penjelasan mengenai teori fungsional ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. Emile Durkheim

Emile Durkheim adalah pelopor utama kemunculan teori struktural fungsional ini. Namun, akar pemikirannya mengenai teori ini telah diawali dari Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte. Auguste Comte pertama kali mengawali pemikirannya mengenai analogi organismic. (Silahkan baca: perkembangan sosiologi era Auguste Comte) Pemikiran Comte ini lalu dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer. Spencer melakukan perbandingan untuk mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme. Dari hasil pengamatannya ini, Spencer mengembangkannya pemikiran requisite functionalism, yang kemudian menjadi panduan analisa substantif Spencer dan penggerak analisa fungsional. Studi Comte dan Spencer inilah yang banyak mempengaruhi pemikiran Durkheim sehingga ia bisa menghasilkan terminology organismik tersebut. Menurut Durkheim, masyarakat merupakan suatu kesatuan berupa sistem yang di dalamnya terdapat bagian – bagian yang dibedakan ((Emile Durkheim, 1947).

Keseimbangan sistem dapat tercipta dan terjaga ketika setiap bagian dari sistem tersebut menjalankan fungsinya masing -masing. Tiap -tiap bagian terhubung dan saling tergantung satu sama lain, sehingga ketika satu saja bagian tidak berfungsi, maka akan tercipta keadaan yang bersifat patologis, di mana keseimbangan sistem akan terganggu. Contoh teori struktural fungsional yang dikembangkan Durkheim ini dapat dilihat pada kondisi masyarakat modern dengan segala kebutuhannya di berbagai aspek, termasuk aspek teknologi informasi dan komunikasi. Ketika akses teknologi informasi dan komunikasi terganggu, semisal karena satelit telekomunikasi yang terganggu, maka hal ini akan mempengaruhi bagian lain dari sistem masyarakat modern ini, hingga keseluruhan sistem terganggu. Kehidupan ekonomi masyarakatnya misalnya, seperti transaksi ekonomi akan ikut terhenti (Emile Durkheim, 1947).

Keadaan ini pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya sampai tercipta keadaan normal yang dapat dipertahankan. Keadaan normal ini biasa disebut oleh para fungsionalis kontemporer sebagai equilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang. Adapun keadaan patologis menunjukkan kondisi ketidakseimbangan atau perubahan sosial.

b. Teori Talcott Parsons

Selain Durkheim, teori struktural fungsional juga mendapat pengaruh dari pemikiran Parsons dan Merton, Malinowski dan Radcliffe Brown, serta Max Weber. Pemikiran Max Weber termasuk salah satu yang banyak memberikan sumbangsih dalam teori ini, terutama terkait adanya visi substantif mengenai tindakan sosial, serta bagaimana strateginya dalam menganalisa struktur sosial. Talcott Parsons sendiri juga mengambil pemikiran Weber. Adapun Parsons, ia mengembangkan

adanya empat komponen dasar dalam teori struktural fungsional yang di dalamnya dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan (Talcot Parson. 1994). Empat komponen penting dalam teori struktural fungsional menurut Parsons yaitu : Adaptation, Goal Atainment, Integration, dan Latency (AGIL). Berikut keterangannya:

- 1) *Adaptation*: sistem sosial atau masyarakat selalu mengalami perubahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, secara internal maupun eksternal.
- 2) *Goal Attainment*: setiap sistem sosial atau masyarakat akan senantiasa terdapat berbagai tujuan yang hendak dicapai sistem sosial tersebut.
- 3) *Integration*: setiap bagian dari sistem sosial terintegrasi satu sama lain serta cenderung bertahan pada equilibrium (keseimbangan).
- 4) *Latency*: sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap atau statis, sehingga setiap perilaku yang menyimpang diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang terus menerus diperbaharui (Talcot Parson. 1998). Parsons memang banyak menyumbangkan pemikirannya dalam teori struktural fungsional ini, sehingga dikenal pula adanya teori fungsionalisme Parsons.

c. Robert K. Merton

Sebagai pendukung dari teori struktural fungsional, Robert K Merton hanya mengajukan tuntutan yang lebih terbatas bagi perspektif ini. Merton beranggapan bahwa pendekatan struktural fungsional ini berpengaruh besar terhadap kemajuan pengetahuan sosiologis. Meski demikian, fungsionalisme struktural dianggapnya masih tidak akan mampu mengatasi seluruh masalah sosial. Merton sendiri mengajukan model analisa fungsional Merton yang didapatkannya sebagai hasil dari perkembangan pengetahuan menyeluruh dari teori-teori klasik, termasuk dari karya Max Weber. Weber sendiri mempengaruhi pemikiran Merton dalam hal birokrasi sehingga membuat Merton lebih terbatas dalam memandang birokrasi, sama halnya dengan Weber (Otto Maduro, 1989).

Adapun organisasi birokrasi modern, menurut Merton di dalamnya memuat beberapa konsep berikut: a. birokrasi adalah bentuk dari struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal, birokrasi meliputi suatu pola kegiatan dengan adanya batas-batas yang jelas; kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam sistem secara ideal berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi. b. jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan dalam keseluruhan struktur birokratis, Status-status yang ada dalam birokrasi, tersusun dalam susunan hirarkis; Kewajiban serta hak-hak dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terperinci; otoritas terletak pada jabatan, bukan terletak pada orang; hubungan-hubungan yang terjalin antara orang-orang dibatasi secara formal.

Model birokrasi seperti yang digambarkan Merton ini dapat diilustrasikan dalam bentuk organisasi-organisasi yang berskala besar. Contohnya saja seperti perusahaan, universitas atau akademi. Paradigma analisa fungsional Merton dapat dirangkum dalam tiga postulat sebagai analisa fungsional yang kemudian disempurnakannya satu demi satu. Secara ringkas, *postulat pertama*, adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat yang menunjukkan bahwa kesatuan fungsional masyarakat memiliki bagian-bagian yang saling bekerja sama dalam tingkat konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan tidak teratasi.

Postulat kedua adalah postulat fungsionalisme universal, beranggapan bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang telah baku memiliki fungsi-fungsinya sendiri yang positif, yang pada akhirnya dapat menetapkan keseimbangan dalam sistem sosial.

Postulat ketiga melengkapi trio postulat fungsionalisme, berupa postulat indispensability, yakni dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan, seluruhnya memenuhi beberapa fungsi serta tugas penting yang harus dijalankan, sehingga tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Sederhananya, dalam postulat ketiga ini, seluruh aspek standar masyarakat tidak hanya memiliki fungsi positif saja, melainkan merepresentasikan bagian-bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan. Postulat ini mengarah pada gagasan bahwa seluruh struktur dan fungsi secara fungsional pada dasarnya diperlukan masyarakat (Karl A. Petter, 1987).

Kritik terhadap teori struktural fungsional banyak dilontarkan karena teori ini dianggap masih memiliki beberapa kelemahan, teori ini mengabaikan konflik yang merupakan keniscayaan dalam masyarakat. Penganut teori ini cenderung menuntut masyarakat berada pada tingkatan yang harmonis dan stabil sehingga dapat berjalan dengan baik. Padahal, faktanya dalam masyarakat seringkali tidak terhindarkan dari kejadian kontradiksi yang dapat memicu konflik. Konflik inilah yang pada akhirnya dapat menimbulkan guncangan dalam sistem (Karl A. Petter, 1987).

3. Contoh Teori Fungsional

a. Menurut Agama

Agama merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang telah terlembaga berdasarkan nilai dan norma tertentu. Teori fungsional Agama memandang sumbangan agama terhadap masyarakat serta kebudayaan sangat penting, karena agama telah mentransendensikan pengalaman sehari-hari manusia dan teori yang memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan, yang memolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma agama yang dianut bersama secara bersama dalam satu keyakinan serta dianggap sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri (W Robert Hefner, 1990).

Menurut Talcott Parsons agama sebagai referensi transendental. Kebutuhan yang demikian disebabkan karena adanya karakteristik dasar dari eksistensi manusia, yaitu ketidak pastian dan ketidak berdayaan dan kelangkaan. Menurut teori fungsional, manusia ditandai oleh dua tipe kebutuhan dan kecenderungan, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menguasai atau mengendalikan lingkungan. Manusia juga mempunyai kebutuhan untuk mengekspresikan perasaan, merespon sesuatu yang datang kepada dirinya, dan terlibat dalam hubungan hubungan. Menurut Robert F. Bales, dalam kaitannya dengan penyelesaian suatu masalah, selain mempunyai kebutuhan untuk berekspresi, manusia juga melakukan hubungan dengan sesamanya (W Robert Hefner, 1990).

b. Adanya Media sosial

Awal mula perkembangan media sosial dianggap sebagai salah satu bentuk ancaman bagi intraksi sosial langsung, karena manjakan masyarakat dengan hubungan secaa elektronik. Banyak pihak yang memilih tidak menggunakan media sosial, akan tetapi pada akhirnya dengan kesadaran masyarakat yang terjadi serta betapa pentingnya media sosial ini menjadikan nilai kebutuhan bahwa media sosial adalah bagian daripada syarat interkasi sosial dalam masyarakat yang terjadi dengan sangat gampang. Pertentangan masyarakat dan ketidakterimaan masyarakat dalam hal-hal yang baru inilah pada akhirnya diterima menjadi salah satu intisari daripada teori fungsional dijalankan, kajian mengenai teori ini terlepas begitusaja dengan konflik, karena semua berjalan sebagaimana waktunya. Meskipun demikian banyak pertentangan yang muncul, salah satu pertentangan atau kritik yang ada dalam teori fungsional ini adalah pandangan yang sama terhadap teori struktural fungsional yang hanya dijakaji dengan proses menunggu (Doyle Paul Jhonson, 1986).

Pendekatan Teori Konflik Terhadap Agama

1. Pengertian Teori Konflik

Teori konflik adalah keadaan yang tidak diinginkan setiap orang lantaran merugikan material dan nonmaterial. Teori konflik ini berasal dari berbagai sumber lain seperti teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Teori konflik atau teori struktural konflik mulai diperkenalkan pada tahun 1960-an (Emile Durkheim, 1947).

Pertama kali, teori ini muncul dalam sosiologi Amerika Serikat sebagai kebangkitan kembali dari berbagai gagasan yang diungkapkan sebelumnya oleh Karl Marx dan Max Weber. Jadi, ide dasar dari teori konflik ini diambil dari pemikiran kedua pemikir ini. Marx dan Weber secara tegas menolak gagasan yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung mengarah pada konsensus dasar

atau harmoni, di mana struktur masyarakat yang berlangsung bekerja untuk kebaikan setiap orang (Lorens Bagus, 2002). Mendefinisikan teori konflik pada tiga pengertian, yaitu:

- a. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain
- b. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya pertentangan pendapat kepentingan, atau pertentangan individu).
- c. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan dan perseteruan. Berdasarkan beberapa pengertian konflik sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan sebuah proses sosial yang melibatkan individu maupun kelompok dalam situasi saling bertolak belakang (Emile Durkheim, 1947).

2. Teori Konflik Menurut Para Ahli

Adapun, para sosiolog dan tokohnya yang memberikan penjelasan mengenai teori konflik dan contohnya, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Karl Marx pelopor utama dari teori konflik. Bahkan, Riyadi Soeprapto dalam “Interaksionisme Simbolik

Karl Marx (1818-1883) dianggap sebagai” menyebutnya sebagai sebagai mahaguru perspektif konflik. Dasar pemikiran Marx yang diambil adalah mengenai eksploitasi besar-besaran yang dianggap sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan sejarah. Marx memandang adanya perbedaan kelas yang salah satunya disebabkan oleh proyek industrialisasi, dan hal ini hanya mengejar keuntungan secara ekonomi semata. Perjuangan masyarakat kelas adalah konsepsi mendasar yang saat itu banyak dikonsepsikan oleh Karl Marx.

Industrialisasi memunculkan kelas kaum buruh dan industrialis yang pada akhirnya mendorong adanya alienasi. Perspektif konflik yang berakar pada pemikiran Karl Marx diakui oleh para sosiolog sebagai salah satu jalan keluar sehingga sangat erat dengan revolusi. Sekalipun demikian, konflik di sini tidak dimaksudkan sebagai suatu revolusi yang radikal apalagi sampai menumpahkan darah. Sebab, bagaimana pun Marx adalah seorang humanis. Pada intinya, teori konflik melihat adanya pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Jadi, dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan (W Robert Hefner, 1999). Beberapa sosiolog yang membangkitkan kembali teori konflik misalnya C. Wright Mills [1956-1959], Lewis Coser: [1956] dan yang lain [Aron, 1957; Dahrendorf, 1959, 1964; Chambliss, 1973; Collins, 1975] (W Robert Hefner, 1999).

Berbeda dengan para fungsionalis yang melihat keadaan normal masyarakat sebagai suatu keseimbangan yang statis, maka para teoritis konflik cenderung melihat masyarakat berada pada konflik terus-menerus dalam kelompok dan kelas. Para teoritis konflik, bahkan mengklaim bahwa para fungsionalis telah gagal mengajukan pertanyaan “secara fungsional bermanfaat”, pernyataan ini ditujukan untuk siapa (W Robert Hefner, 1999).

Keseimbangan yang serasi yang dimaksud pada fungsionalis dianggap hanya bermanfaat bagi sebagian orang saja, sementara bagi sebagian yang lain justru merugikan. Teoritis konflik memandang bahwa suatu keseimbangan masyarakat seperti yang dimaksud para fungsionalis ini adalah khayalan semata, lantaran mereka tidak mampu mengejawantahkan bagaimana kelompok yang dominan melakukan eksploitasi terhadap kelompok lain dan membungkamnya. Dalam teori Marx, eksistensi hubungan pribadi dalam produksi dan kelas-kelas sosial dipandang sebagai elemen kunci yang ada dalam banyak masyarakat. Marx juga berpendapat bahwa perubahan sosial yang tercipta banyak dipengaruhi oleh adanya pertentangan yang terjadi antara kelas dominan dan kelas bawah.

- b. Max Weber

Weber menekankan adanya beberapa konflik yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. *Pertama*, adalah konflik dalam arena politik. Konflik politik ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, karena kehidupan sosial dalam kadar tertentu adalah wujud pertentangan dalam rangka memperoleh kekuasaan dan dominasi dari individu atau kelompok tertentu. Weber juga melihat dalam kadar tertentu, bahwa pertentangan ini sebagai tujuan untuk memperoleh

keuntungan ekonomi. *Kedua*, adalah tipe konflik terkait gagasan dan cita-cita. Weber mengungkapkan bahwa orang seringkali tertantang untuk mendominasi pandangan dunia mereka, baik berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial ataupun konsepsi mengenai gaya hidup cultural yang terbaik.

Gagasan cita-cita ini bukan hanya dipertentangkan, melainkan juga dijadikan sebagai senjata atau alat untuk pertentangan yang lainnya, seperti misalnya pertentangan politik. Dari sini, dapat diketahui bahwa Weber bukanlah seorang materialis ataupun idealis. Weber cenderung dianggap sebagai sosok pemikir yang mengkombinasikan pola penjelasan materialis dan idealis dalam mengungkapkan pendekatan sosiologis yang bersifat menyeluruh (P Samuel Huntington, 1996).

c. Dahrendorf

Teori konflik lainnya yang cukup populer adalah Dahrendorf. Dahrendorf merupakan seorang intelektual Jerman yang populer lewat karyanya “Class and Class Conflict in Industrial Society” 1959. Bagi Dahrendorf, penjelasan kaum fungsionalis mengenai integrasi, nilai dan konsensus, serta stabilitas dianggap tidak seimbang. Ia menolak asumsi kaum fungsionalis ini dan berusaha mendasarkan teorinya pada suatu perspektif Marxis modern. Baginya, konflik sosial yang didasarkan pada oposisi kepentingan dan konsekuensi konflik dapat meluas dan sekaligus dapat melahirkan perubahan sosial.

Dahrendorf juga mengajukan gagasan mengenai teori konflik dialektika. Dalam teori ini disebutkan bahwa masyarakat adalah subjek dengan dua wajah, yakni konflik dan konsesus. Dari sini, Dahrendorf mengusulkan pembagian teori sosiologi menjadi dua bagian, yaitu teori konflik dan teori konsesus.

Dalam teori konflik, kita dapat menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan di dalam masyarakat. Sedangkan dalam teori konsesus, kita bisa menguji nilai integrasi yang terjadi dalam masyarakat. Dahrendorf beranggapan bahwa masyarakat tidak akan ada tanpa konsesus dan konflik karena penyatuan masyarakat terjadi karena adanya ketidakbebasan yang dipaksakan. Hal ini sekaligus mencerminkan bahwa pada posisi tertentu dalam masyarakat, terdapat otoritas terhadap posisi yang lain yang mendelegasikan kekuasaan.

Contoh Teori Konflik

1. Menurut pandangan Agama

Secara umum, banyaknya sistem nilai (organisasi keagamaan dan sekuler) menyebabkan terjadinya konflik dalam diri seseorang. Ia dihadapkan pada keharusan untuk memilih di antara sistem-sistem nilai tersebut. Secara khusus, pada diri seorang individu, ia senantiasa dihadapkan dengan masalah-masalah internal yang berkaitan dengan hidupnya sendiri dan munculnya konflik tidak sekedar disebabkan oleh ketimpangan sumber daya ekonomi atau produksi saja, sebagaimana yang disinyalir oleh berbagai pihak selama ini. Konflik sebagai kategori sosiologis bertolak belakang dengan pengertian perdamaian dan kerukunan. Konsep terakhir ini merupakan hasil dari proses asosiatif, sedangkan yang pertama dari proses disosiatif. Proses asosiatif adalah proses yang mempersatukan dan proses disosiasif sifatnya menceraikan atau memecah. Namun demikian konflik dapat juga disebabkan oleh masalah-masalah yang lebih luas dari hal-hal tersebut. Agama tidak jarang dijadikan “alat” dan dituding sebagai penyebab setiap kali terjadi kerusuhan atau konflik dalam masyarakat (Emile Durkheim, 1947).

2. Menurut Sosiologi

Teori konflik memiliki asumsi dasar bahwa perbedaan kepentingan antar kelas sosial menciptakan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Akar dari terciptanya konflik dalam masyarakat adalah ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan kekayaan yang menciptakan kesenjangan kelas sosial. Kekuasaan meliputi akses terhadap sumber daya. Level kekuasaan individu atau kelompok berbeda-beda. Perbedaan inilah yang disebut kesenjangan. Semakin besar kesenjangan, semakin besar potensi timbulnya konflik sosial. Kesenjangan tidak hanya ditentukan oleh perbedaan kelas, namun bisa juga ras, gender, kultur, selera, agama, dan lainnya. Sebagai contoh, seorang pekerja

harus bekerja keras dan loyal pada bosnya agar bisa sukses. Loyalitas dan kerja keras merupakan nilai yang disepakati atau konsesus (Emile Durkheim, 2003).

Teori konflik banyak menginspirasi munculnya gerakan sosial akar rumput yang melakukan perlawanan di berbagai aspek, salah satunya adalah feminisme. Gerakan feminisme terinspirasi oleh teori konflik untuk melihat bahwa relasi gender sebenarnya merupakan relasi eksploitatif. Kemunculan awal feminisme, misalnya, melihat laki-laki sebagai kelas dominan yang mengeksploitasi perempuan melalui kekuatan ideologis dan nilai-nilai bahwa domestik adalah wilayah perempuan dan publik adalah wilayah laki-laki. Feminisme awal menganggap domestifikasi sebagai kekangan atas kebebasan yang menjadi hak setiap individu (Emile Durkheim, 2003).

3. Menurut Antropologi

Menurut coser konflik terbagi dua, yaitu:

- a. Konflik realistik, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Misalnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan gaji dipenuhi
- b. Konflik Non-realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat maju melakukan pengkambing hitaman sebagai pengganti ketidak mampuan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.
- c. Teori konflik merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori sosiologi Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa pemilikan dan kontrol sarana-sarana juga bertugas sebagai pengontrol apalagi pada abad kesembilan belas. Bentuk penolakan tersebut ia tunjukkan dengan memaparkan perubahan yang terjadi di masyarakat industri semenjak abad kesembilan belas, diantaranya Dekomposisi modal, Dekomposisi tenaga kerja, Timbulnya kelas menengah baru.
- d. Kasus kelompok minoritas yang terjadi pada tahun 1960-an kesadarannya telah memuncak, antara lain termasuk kelompok-kelompok kulit hitam, wanita, suku Indian dan Chicanos. Kelompok wanita sebelum tahun 1960-an merupakan kelompok semu yang ditolak oleh kekuasaan di sebagian besar struktur sosial dimana mereka berpartisipasi. Pada pertengahan tahun 1960-an muncul kesadaran kaum wanita untuk menyamakan derajatnya dengan kaum laki-laki.

Secara garis besarnya berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik antara lain:

Berdasarkan sifatnya, yakni *konflik destruktif* merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam kesumat dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Sambas, Sampang dan lain sebagainya. *Konflik Konstruktif*, yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari berbagai kelompok dalam menghadapi permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan (Kusnadi, 2002).

Soerjono Soekanto, membagi konflik sosial menjadi lima bentuk antara lain, **pertama**, Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan perspektif dan sebagainya. **Kedua**, Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras. **Ketiga**, konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. **Keempat**, Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. **Kelima**, konflik atau pertentangan yang bersifat Internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Sementara Ralf Dahrendorf, mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam antara lain : Pertama, Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau

biasa disebut konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari berbagai macam yang dimilikinya. Kedua, Konflik antara kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Konflik antara Kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Keempat, Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara atau organisasi internasional.

4. Penyebab Dan Contoh Terjadinya Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber – sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011).

- a. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil.
- b. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorang. Hal ini telah menyebabkan konflik-konflik antar individu. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi munculnya konflik sosial. Perbedaan kebudayaan, tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok (Arief Zulkifli, 2010). Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan masyarakat luas.
- c. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda, kelompok-kelompok akan berkompetitif dan berkonflik untuk memperebutkan peluang dan kesempatan.
- d. Perbedaan struktur Ideologi. Ideologi dapat berarti prinsip-prinsip hidup yang dimiliki seorang individu ataupun kelompok, ideologi dalam konteks kenegaraan merupakan prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan tata kehidupan suatu Negara. Perbedaan ideologi menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi yang dapat menjadi sumber terjadinya konflik. Perbedaan ideologi antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan perbedaan pola pikir di antara kedua belah pihak. Selanjutnya dengan perbedaan pola pikir di antara kedua belah pihak tersebut akan melahirkan pola aktivitas yang berbeda – beda dan saling berhadapan untuk suatu kepentingan.
- e. Perubahan sosial yang terlalu cepat. Perubahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru. Perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan proses-proses sosial di dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.
- f. Persaingan penggunaan Sumberdaya. Manusia modern saat ini semakin meningkat dan hampir tidak ada batasnya. Sedangkan sumberdaya alam yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sangat terbatas. Setiap hari manusia memerlukan bahan bakar minyak untuk transportasi mereka, untuk energi listrik, batu-batuan dan kayu untuk tempat tinggal, dan sebagainya. Sedangkan pembaharuan sumberdaya alam tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak sebanding permintaan masyarakat yang terus meningkat. Akibatnya para kelompok dan individu yang berkepentingan bersaing untuk dapat menguasai sumberdaya yang menguntungkan. Pada proses penguasaan ini, tidak jarang menjadi konflik dalam masyarakat.
- g. Persaingan kedudukan dan peranan. Apabila dalam diri seseorang atau kelompok terdapat keinginan-keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dan peranan terpadang maka terjadilah persaingan. Sejumlah

kekerasan yang terjadi akibat konflik berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan menjadi noda hitam dalam perjalanan reformasi

5. Contoh Dari Konflik Agama Dan Sosial

Tercatat beberapa kasus yang terjadi sepanjang 20 tahun terakhir. Namun, noda paling hitam itu terjadi di Ambon, Maluku pada 1999; Poso, Sulawesi Tengah pada 2000-2001; dan Sampit, Kalimantan Tengah pada 2000-2001.

1. Konflik Maluku

Konflik Maluku bermula dari peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Selasa, 19 Januari 1999. Kerusuhan berawal dari bentrokan antarwarga yang dipicu kesalahpahaman di Batumerah Ambon. Bentrokan kemudian membesar menjadi kerusuhan antar desa yang penduduk mayoritasnya berbeda agama. Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada 18 Februari 1999, kerusuhan juga terjadi di berbagai tempat di Maluku dalam waktu yang hampir bersamaan, dipicu sejumlah isu yang provokatif. Suasana Ambon, pasca-kerusuhan berdarah di kota Ambon, Maluku. Kontras menyimpulkan peristiwa kerusuhan di Ambon adalah hasil proses akumulasi konflik antar kelompok yang pada mulanya bersifat lokal. Namun, karena keterlibatan peran-peran tertentu dari sejumlah provokator, konflik berubah menjadi kerusuhan dengan skala dan kerusakan yang luas.

2. Konflik Poso

Konflik yang terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen ini terjadi dalam beberapa fase sepanjang akhir 1998 hingga 2001. Sejumlah rekonsiliasi pun dilakukan untuk meredakan konflik. Upaya itu kemudian menemui hasil dengan ditandatanganinya Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Selain rekonsiliasi, Deklarasi Malino juga menyepakati rehabilitasi sosial, pemulangan pengungsi, serta sejumlah program yang mendukung normalisasi kehidupan warga Poso. Belum diketahui secara pasti jumlah korban akibat Konflik Poso. Namun, dikutip dari dokumentasi Kompas, pasca-Deklarasi Malino pemerintah menyiapkan anggaran Rp 100 miliar sebagai santunan atas korban tewas yang diprediksi mencapai 1.000 orang.

3. Konflik Sampit

Konflik antar-etnis di Sampit, Kalimantan Tengah, bermula dari bentrokan yang terjadi pada 18 Februari 2001, antara warga suku Dayak dan suku Madura sebagai pendatang. Peristiwa kemudian meluas ke seluruh provinsi ini, termasuk di ibu kotanya, Palangkaraya. Diduga, konflik antar-etnis tersebut dipicu oleh persaingan di bidang ekonomi. Pengungsi yang merupakan etnis Madura akibat konflik antar-etnis di Sampit, Kalimantan Tengah, periode Februari 2001. Antropolog Belanda Gerry van Klinken memprediksi korban tewas mencapai 500 orang hingga lebih dari 1.000 orang. Selain itu, konflik juga menyebabkan lebih dari 25.000 orang meninggalkan rumahnya untuk mengungsi.

4. Kekerasan terhadap Ahmadiyah

Pelanggaran atas hak beragama dan berkeyakinan paling parah dialami jemaah Ahmadiyah. Komnas HAM mencatat setidaknya telah terjadi pelanggaran hak asasi jemaah Ahmadiyah di 12 daerah. Sebagian besar pelanggaran tersebut dilegitimasi oleh peraturan daerah, seperti Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Barat dan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanganan JAI di Kota Banjar.

5. Kasus Mushala Asy-Syafiyah di Denpasar

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan beribadah juga dialami oleh umat Muslim di Denpasar, Bali, pada Mei 2008. Sebagian kelompok masyarakat melarang pembangunan mushala Asy-Syafiyah di Kota Denpasar (Kontributor Kompas.Com/Rahmat Rahman Patty). Jajak Pendapat Litbang Kompas dan Data Konflik Sosial 2009-2012 Pengusiran ribuan anggota kelompok Gafatar (Gerakan Pajar Nusantara) (Kompas/Lucky Pransiska).

6. Pembangunan Gereja di Aceh Singkil

Pada 2 April 2016, Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) menyampaikan pengaduan terkait adanya diskriminasi dalam mendirikan gereja. Boas menuturkan, sebelum maupun sesudah peristiwa pembakaran gereja HKI pada 13 Oktober 2015, izin pembangunan gereja dipersulit. Padahal, seluruh persyaratan yang tercantum dalam (Kompas/Lucky Pransiska) Peraturan Gubernur Tahun 2007 tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah telah dipenuhi ((Kompas/Lucky Pransiska). Menurut dia, sudah berpuluh-puluh tahun semua Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Aceh Singkil tidak memiliki guru agama Nasrani. Padahal, pelajaran agama menjadi satu syarat bagi kelulusan siswa.

7. Terhadap Warga Syiah di Sampang.

Kekerasan Peristiwa ini terjadi pada Agustus 2012. Satu orang tewas, empat orang lainnya kritis, dan puluhan rumah terbakar akibat penyerangan terhadap warga Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Warga Syiah korban kekerasan terkait agama di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, bersepeda melintas di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/6/2013). Mereka bersepeda dari Madura menuju Istana Negara, Jakarta, untuk menuntut kejelasan sikap pemerintah dalam penyelesaian konflik bernuansa agama.

Penutup

Konflik sosial dapat terjadi di dalam masyarakat baik pada masyarakat primitif, masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Akan tetapi pada masyarakat tradisional konflik lebih bersifat *sporadis* dan berkaitan erat dengan tradisi-tradisi dan perinsip-perinsip kehidupan, sedangkan pada masyarakat modern konflik sosial lebih cenderung disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat politik dan ekonomi.

Konflik merupakan fenomena sosial yang hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan selalu ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial.

Untuk dapat menyelesaikan konflik, maka perlu diketahui mengapa konflik dapat terjadi. Diantara penyebab-penyebab terjadinya konflik secara sederhana dibagi menjadi 2 (dua) antara lain : 1). Kemajemukan horizontal; 2). Kemajemukan vertical.

Sedangkan menurut para pakar sosiologi terdapat beberapa penyebab konflik terjadi dalam masyarakat sosial antara lain: 1). Perbedaan pendirian dan keyakinan; 2). Perbedaan kebudayaan; 3). Perbedaan kepentingan; 4). Perbedaan ideologi; 5). Adanya perubahan social; 6). Kompetitif terhadap Sumber daya; 7). Persaingan kedudukan dan jabatan.

Agama memiliki kekuatan utama, yaitu sebagai faktor kekuatan daya penyatu (*centripetal*) dan faktor kekuatan daya pemecah belah (*centrifugal*) Selain sebagai keyakinan yang dianut secara paripurna, agama juga berfungsi sebagai social control dan motivator pembangunan berdimensi kemanusiaan. Bahkan agama juga berperan sebagai instrumen perekat keutuhan bangsa. Dengan menyadari arti penting agama tadi, maka fungsi dan peran agama perlu dipertahankan kelangsungannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Doyle Paul, *Teori Sosial, Klasik dan Modern* (Jakarta : PT. Gramedia, 1986).
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Istilah konflik secara etimologi berasal dari bahasa Latin "con" yang berarti bersamaan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan.
- Jebarus, *Exposure-Journal of Advanced Communication Vol. 2 No. 1* February. (2012)
- Jones, P (2016) *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat, Cet.II*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002..
- Berger, Peter Ludwig, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, New York: Anchor Books, 1967.
- Durkheim, Emile, *The Elementary Forms of Religious Life, translated by Joseph Ward Swain*, New York: Free Press, 1947.
- Hamilton, Malcolm B. *The Sociology of Religion*, London: Routledge, 1995.
- Leibniz, Freiherr von Gottfried Wilhelm, *Theodicy: Essays on The Goodness of God, the freedom of Man and the Origin of Evil, terj. Oleh E.M. Huggard*, Oxford: Biblio Bazaar, 2007.
- Lari, Sayyid Mujtaba Musavi, *God and His Attributes: Lessons of Islamic Doctrine*, trans. Hamid Algar, Potomac: Islamic Education Center, 1989..
- Marx, Karl, *Early Writings*, London: Pinguin Books, 1992.
- MaCloskey, H.J., *God and Evil*, Netherlands: Martinus Nijhoff, the Hague, 1974.
- Mackie, J L., *The Miracle of Theism: Arguments for Agains the Existence of God*, Oxford: Clarendon Press, 1982.
- Morris, Brian. *Antropological studies of religion an introductory text*. USA: Cambridge University Press. 1987.
- McGuire, Meredith B. *Religion the Social Context*. Fourth Edition. United State of America: Wadsworth Publishing Company. 1997.
- Noon, Haizan MD. *Islamic Perspective of Sociology and Anthropology Some Reflections*. Malaysia: International Institute of Islamic Taught East and South East Asia. 2017.